

Kumawula, Vol.8, No.3, Desember 2025, 1004 – 1016

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i3.59768>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

MENGGALI KEBUTUHAN DIFABEL DALAM KEBENCANAAN: UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSIF TANGGAP BENCANA DI SURABAYA

Lintang Wahyusih Nirmala^{1*}, Biandro Wisnuyana¹, Rizky Sugianto Putri¹,
Lucy Dyah Hendrawati¹, Pudjio Santoso¹, Rachmat Dimas Oktafenanda¹

¹ Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*Korespondensi : lintang.wahyusih.n@fisip.unair.ac.id

ABSTRACT

Access to disaster knowledge and mitigation should be available to all levels of society, including people with disabilities. This article presents the results of community service activities aimed at enhancing disaster knowledge among people with disabilities by involving the government, academics, and social institutions. The program sought to assess knowledge capacity and explore the specific needs of people with disabilities in Surabaya related to disaster preparedness. This initiative represents an effort to provide equal access to knowledge, encourage active participation, and reduce the stigma of powerlessness often associated with people with disabilities. The activity took the form of a seminar featuring three main speakers: the East Java Provincial Social Service, the East Java Regional Disaster Management Agency (BPBD), and the East Java BK3S. It was attended by 65 participants, including people with disabilities, volunteers, and academics. Data collection employed pre-tests and post-tests completed by participants with disabilities, along with interviews with resource persons and participant representatives. The findings were visualized using a word cloud generator to highlight the expressed needs of people with disabilities regarding disasters. Results indicated that the key requirements for improving disaster response knowledge and skills include access to information, training and simulations, assistance and mentoring, and the development of community networks. Effective disaster management requires synergy between various institutions: academics contribute to pre-disaster preparation, the Health and Safety Agency (BK3S) supports social welfare, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) oversees regional disaster response, and the Social Service Agency focuses on meeting the needs of survivors. The involvement of cross-sector agencies in this program reflects efforts to realize the Sustainable Development Goals' principle of Leave No One Behind and to foster a more inclusive society.

Keywords: Capacity building; disaster capacity; needs of the disabled; inclusive society

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 10/12/2024

Diterima : 09/12/2025

Dipublikasikan : 10/12/2025

ABSTRAK

Akses terhadap pengetahuan dan mitigasi bencana seharusnya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi kelompok difabel. Artikel ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat terkait upaya peningkatan pengetahuan kebencanaan pada kelompok difabel dengan melibatkan pemerintah, akademisi dan lembaga sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pengetahuan dan menggali kebutuhan kelompok difabel di Surabaya terkait dengan kebencanaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah salah satu upaya memberikan akses pengetahuan yang sama, mendorong partisipasi, dan meminimalisir stigma ketidakberdayaan kelompok difabel dalam masyarakat. Bentuk kegiatan berupa seminar dengan menghadirkan tiga narasumber utama diantaranya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, BPBD Jawa Timur, dan BK3S Jawa Timur serta diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari berbagai kelompok difabel, relawan, dan akademisi. Pre-test dan post-test digunakan dalam pengumpulan data yang harus diisi peserta kelompok difabel serta pengumpulan data melalui wawancara pada narasumber dan perwakilan peserta. Data yang didapatkan ditampilkan dengan *word cloud generator* untuk mengetahui kebutuhan kelompok difabel terkait kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana yaitu akses terhadap informasi, pelatihan dan simulasi, bantuan dan pendampingan, serta jejaring komunitas difabel. Dalam penanganan bencana dibutuhkan sinergitas peran akademik pada persiapan pra-bencana, peran BK3S pada kesejahteraan sosial, peran BPBD pada penanggulangan bencana daerah, serta peran Dinas Sosial yang berfokus pada penanganan dan pemenuhan kebutuhan penyintas bencana. Keterlibatan instansi lintas sektor pada program pengabdian masyarakat ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan SDGs *Leave No One Behind* dan membangun masyarakat inklusif.

Kata Kunci: Peningkatan kapasitas; kapasitas kebencanaan; kebutuhan difabel; masyarakat inklusif

PENDAHULUAN

Kelompok difabel sebagai bagian dari masyarakat seringkali mendapatkan stigma dan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang dimiliki oleh kelompok difabel adalah hal yang kompleks, dinamis, multidimensional dan kontroversial (Bickenbach et al., 2011). Hal tersebut seringkali dianggap dapat mempengaruhi partisipasi keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga kelompok difabel jarang dilibatkan dalam beberapa jenis kegiatan masyarakat. Masyarakat enggan untuk berinteraksi terhadap difabel karena memiliki kepribadian yang tertutup dan dianggap sulit untuk dapat bekerja dalam sektor formal (Mutasim, 2016).

Kelompok difabel juga seringkali mendapatkan kesalahpahaman yaitu ketidakmampuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang dalam masyarakat karena adanya ekspektasi terhadap ketidakmampuan dalam kondisi mereka (Wicaksono et al., 2021). Padahal ketidakterlibatan kelompok difabel dipengaruhi banyak faktor terlepas dari stigma yang melekat pada mereka. Melalui Data Nasional Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 9% (23,3 juta jiwa)² memiliki tantangan untuk mengakses layanan dasar dalam hal kependudukan, kesehatan, dan peluang lapangan pekerjaan (Siyaranamual, 2018). Padahal akses terhadap layanan dasar dan peluang lapangan pekerjaan

tersebut adalah hak seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

Kelompok difabel sebagai bagian dari masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa terkecuali. Negara hadir melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan salah satunya turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Sayangnya, di Kota Surabaya masih belum mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas yang terkait dengan pemenuhan hak untuk bekerja (Purba et al., 2023).

Secara umum fasilitas publik yang memadai bagi kelompok difabel di Surabaya belum disediakan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian Tikasari et al (2019) perhatian dan pengetahuan mengenai kebutuhan dan kondisi penyandang tuna netra masih dirasa kurang karena di rumah sakit maupun puskesmas belum tersedia *guiding block* yang dapat memberikan arah untuk berjalan. Fasilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas belum memberikan manfaat yang optimal (Purnomo et al., 2021). Kurangnya akses layanan dan dukungan fasilitas yang sesuai kebutuhan mereka menjadi salah satu alasan yang semakin membatasi gerak kelompok difabel.

Tantangan dalam beradaptasi bagi kelompok difabel tidak hanya dalam situasi sehari-hari saja, namun juga ketika terjadi bencana. Indonesia sebagai wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang beragam, kondisi kelompok difabel akan semakin rentan dari berbagai sisi. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017, Surabaya berisiko mengalami gempa bumi karena dua patahan aktif melintasi Waru dan Surabaya. Kedua patahan tersebut bergeser dengan kecepatan 0,5 mm/tahun dan berpotensi menimbulkan gempa bumi daratan di sekitar ML6,5. Sehingga kebutuhan pengetahuan

terhadap gempa bumi, waktu reaksi terhadap gempa bumi, perlindungan diri dan prosedur evakuasi perlu diperhatikan. Peningkatan kapasitas melalui simulasi evakuasi gempa bumi secara teratur dan pelatihan perlindungan diri dapat meminimalisir risiko terkena dampak buruk gempa bumi (Sianturi et al., 2020). Setijaningrum et al (2024), menambahkan pentingnya infrastruktur yang inklusif dan desain yang dapat diakses di ruang publik, serta secara proaktif memprioritaskan keselamatan semua orang termasuk kelompok penyandang disabilitas yang rentan. Aksesibilitas yang memadai seperti jalur landai, adanya rambu sentuh, isyarat audio dapat membantu navigasi dan mobilitas bagi penyandang disabilitas selama proses evakuasi. Akses terhadap juru bahasa isyarat, informasi yang mudah diakses, dan teknologi komunikasi juga menjadi kebutuhan dalam kesiapan penyandang disabilitas dalam mengelola risiko pribadi selama bencana.

Meskipun pemerintah semakin berkomitmen untuk melibatkan penyandang disabilitas, tetapi mereka masih menghadapi risiko dan hambatan yang lebih besar saat bencana terjadi. Tidak hanya dari sisi penanganan saat bencana terjadi tetapi juga dari sisi preventif terkait dengan pengetahuan kebencanaan. Padahal ketika bencana terjadi yang terdampak adalah semua orang sehingga pengetahuan dan mitigasi bencana harus dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko bencana dan mampu merespon bencana, masyarakat harus fokus kepada kemampuan, bukan kepada ketidakmampuan (Kelman & Stough, 2015). Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan melibatkan kelompok difabel dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan mitigasi bencana.

Tujuan adanya kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan bagi kelompok difabel ini adalah sebagai bentuk membuka akses pengetahuan kebencanaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengapa akses penting bagi kelompok difabel? Tanpa aksesibilitas,

penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang membatasi mereka terhadap sumber daya, peluang, serta partisipasi sosial dan politik. Lingkungan, produk, dan layanan yang mudah diakses dapat membantu menghilangkan hambatan ini dan memungkinkan penyandang disabilitas menjalani kehidupan yang lebih baik serta berkontribusi bagi masyarakat mereka (Panda & Kaur, 2023).

Dengan adanya aksesibilitas bisa mendukung adanya kesetaraan untuk semua. Hal ini menjadi bagian dari membangun masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang merangkul keberagaman dan kesetaraan mendasar bagi semua individu (Lutfiyya & Bartlett, 2020). Kelompok difabel memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya terkait akses pelayanan kebencanaan. Terdapat beberapa cara untuk melibatkan kelompok difabel dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana gempa merupakan upaya preventif untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan pada penyandang disabilitas (Modim et al., 2023).

Seperti pengembangan Sekolah Siaga Bencana dalam penelitian Pramono & Febriyantoko (2020) yang menggunakan peta jalur evakuasi bencana dengan huruf braille dapat membantu siswa penyandang disabilitas lebih memahami lingkungan fisik sekolah dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sekolah Siaga Bencana juga diterapkan dalam kegiatan pengabdian oleh Lasaiba (2023) dengan menggunakan metode penyuluhan dan praktik simulasi evakuasi memungkinkan pengaplikasian pengetahuan yang telah dipelajari seperti bagaimana memberikan pertolongan pertama, menggunakan peralatan tanggap darurat, dan melakukan evakuasi yang aman. Kegiatan sosialisasi siaga bencana juga dilaksanakan secara daring pada pengabdian Sari et al (2020) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ABK, yang ditunjukkan dengan respons verbal dan

nonverbal. Hal tersebut mengindikasikan kemampuan ABK yang mulai tanggap terhadap bencana.

Selain sosialisasi, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berdaya kelompok difabel dalam hal kebencanaan adalah menguatkan modal sosial. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sakina, Setyowati, & Albizzia (2019) menjelaskan bahwa penguatan modal sosial inklusif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana, baik itu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana. Hal ini dapat meningkatkan dampak positif terkait kesiapsiagaan bencana, tidak hanya bagi individu maupun keluarga difabel tetapi juga bagi masyarakat ketika bencana terjadi.

Adanya pembentukan Difagana di Yogyakarta adalah salah satu bentuk pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas kelompok difabel untuk berpartisipasi dalam masyarakat sekitar. Penguatan modal sosial inklusif Difagana Yogyakarta dapat melindungi masyarakat dari kerentanan yang dibuktikan dengan peranan yang dilakukan oleh individu dan antar individu. (Sakina et al., 2019). Kegiatan pemberdayaan-pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya merupakan tongkat estafet pembangunan masyarakat inklusif yang harus dilanjutkan. Termasuk dalam kegiatan yang mendasari tulisan ini berupa kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan dengan sasaran kelompok difabel di Surabaya.

Urgensi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah menyajikan kondisi pengetahuan kebencanaan kelompok sasaran serta hasil kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan kelompok difabel di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk membangun keberlanjutan kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat inklusif. Dalam pembangunan masyarakat inklusif yang masuk dalam ranah SDGs, pembangunan tidak bisa berdiri sendiri sehingga dasar kegiatan harus bekerja sama dengan pihak luar. Dengan menggandeng berbagai instansi, baik

pemerintahan, akademisi dan lembaga sosial, diharapkan perhatian kepada kelompok rentan, seperti kelompok difabel, semakin tinggi.

Aspek SDGs pada kegiatan ini tidak hanya fokus pada poin *Partnerships for The Goals* melalui kemitraan lintas pemangku kepentingan, tetapi juga fokus pada aspek pengembangan kapasitas dan disabilitas yang masuk pada poin *Reduced Inequalities*. Hal ini dapat berdampak baik dalam banyak hal, terutama untuk membuka akses kesetaraan pengetahuan, mendorong tindakan partisipatif dan juga mengurangi stigma ketidakberdayaan kelompok difabel dalam masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan atau belum diperhatikan dari berbagai pihak untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur. Dengan model pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Pendidikan Masyarakat yang berupa Seminar dan berlangsung di Kota Surabaya dengan pertimbangan kemudahan akses transportasi bagi peserta, baik transportasi pribadi maupun transportasi umum. Seminar dilaksanakan dengan menghadirkan tiga narasumber dari instansi pemerintahan yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S. Melalui model seminar diharapkan materi dapat tersampaikan ke peserta (lihat gambar 1).



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

(Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024)

Peserta kegiatan terdiri dari 65 orang yang terdiri dari kelompok difabel, pendamping difabel, mahasiswa difabel dari beberapa Universitas di Surabaya, anggota relawan BK3S dan akademisi dari Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga. Beberapa perwakilan kelompok difabel yang diundang dalam kegiatan ini berasal dari Komunitas Mata Hati, PERTUNI Jawa Timur, HWDI Kota Surabaya, HWDI Jawa Timur, PERSAS, POTADS dan Peduli Kasih. Serta perwakilan mahasiswa difabel dari FISIP Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas PGRI Adi Buana. Sasaran peserta kegiatan adalah anggota kelompok difabel yang masih berusia muda hingga dewasa dengan harapan dapat membagikan informasi pengetahuan kebencanaan ini ke kelompok masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan memberikan kuesioner pre-test sebelum kegiatan dimulai untuk diisi oleh peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian materi oleh ketiga narasumber. Setelah sesi penyampaian materi berakhir, terdapat sesi tanya jawab dan kuis terkait dengan materi-materi tentang bencana dan peluang partisipasi dari kelompok difabel (lihat gambar 2).



Gambar 2. Tanya Jawab selama Kegiatan
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024)

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner pre-test dan post-test dengan *Forms* dari Google serta wawancara untuk narasumber dan perwakilan peserta. Kuesioner pre-test dan post-test diberikan hanya kepada anggota kelompok difabel sesuai dengan sasaran target kegiatan untuk mengetahui keterserapan pengetahuan kebencanaan narasumber bagi peserta.

Kuesioner pre-test diberikan ke peserta kegiatan sebelum acara dimulai melalui *Whatsapp Group*. Terdapat 21 pertanyaan yang menggali tentang pengetahuan awal peserta tentang kebencanaan. Beberapa pertanyaan diantaranya tentang:

1. Pengetahuan informasi bencana alam
2. Respon diri ketika terjadi bencana
3. Pengetahuan mitigasi bencana
4. Akses informasi dan berjejaring komunitas
5. Kebutuhan difabel saat bencana

Setelah kegiatan berlangsung, peserta diberi kuesioner post-test dengan 15 pertanyaan singkat mengenai pemahaman materi yang disampaikan narasumber. Beberapa pertanyaan tersebut meliputi:

1. Kemudahan memahami penyampaian materi
2. Relevansi materi dengan kondisi diri
3. Kebutuhan peningkatan kemampuan tanggap bencana

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh masing-masing instansi narasumber terkait dengan kegiatan sosial kebencanaan, kegiatan sosial difabel dan kegiatan difabel dalam konteks kebencanaan. Setiap instansi memiliki program yang saling berkaitan satu sama lain terkait pencegahan bencana, penanganan ketika bencana dan pemberdayaan difabel. Data-data yang terkumpul melalui kuesioner dan wawancara diolah untuk dianalisis. Untuk membantu analisis data, peneliti menggunakan bantuan *word cloud generator* dalam menyajikan kebutuhan apa saja yang sering disebutkan oleh para peserta dan didukung dengan gambar *chart* dalam mempresentasikan hasil temuan dari sebaran kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berada dalam wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang beragam sudah seharusnya masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan. Apalagi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dari sisi geologis dan geografis (Adi et al., 2023). Pengetahuan kebencanaan yang seharusnya dimiliki masyarakat Indonesia sebagai pengetahuan dasar seharusnya tidak hanya pengetahuan umum sebagai informasi tetapi juga kemampuan terkait dengan tindakan preventif dan pasca-bencana. Sehingga informasi dan pengetahuan kebencanaan seharusnya lebih mudah diakses masyarakat. Mengikuti perkembangan jaman, pengetahuan mengenai kebencanaan biasanya mudah diakses melalui sosial media dibandingkan media penyebarluasan informasi lainnya. Komunikasi bencana dengan basis digital yang dapat mengakselerasi adanya mitigasi bencana secara holistik (Aziz, 2024). Hal ini terbukti dari sebaran kuesioner pre-test sebelum kegiatan, sebanyak 55% peserta memperoleh informasi kebencanaan melalui sosial media.

Dari sebaran awal kuesioner pre-test sebelum kegiatan, sebanyak 95,2% peserta telah

mengetahui informasi umum bencana dengan jenis bencana gempa bumi (90,5%). Namun sayangnya, pengetahuan informasi umum bencana ini belum disertai pengetahuan tentang mitigasi bencana. Masih ada 33,3% peserta tidak mengetahui informasi mengenai mitigasi bencana dan hanya 71,4% yang memiliki pengetahuan ketika terjadi bencana. Nampaknya kondisi ini adalah fenomena yang sering dimiliki oleh kelompok difabel yang tidak hanya terjadi pada peserta kegiatan tetapi juga secara global. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UN Office for Disaster Risk Reduction terhadap 6324 responden yang memiliki kesulitan fungsi terhadap tubuh, sebanyak 84% responden tidak memiliki persiapan diri bila berpotensi terdampak bencana (UNDRR, 2023).

Pengetahuan kebencanaan tidak hanya sebatas pengetahuan umum mengenai jenis-jenis bencana tetapi juga harus memahami terdapat tiga fase bencana yaitu (1) fase pra-bencana, (2) fase tanggap darurat bencana, dan (3) fase pasca-bencana. Dalam fase pra-bencana difokuskan pada kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pembahasan dalam tulisan ini lebih banyak menyajikan tentang kebutuhan yang mendukung fase pra-bencana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini termasuk dalam bagian fase pra-bencana dengan menjangkau kelompok masyarakat yang rentan dan sering terabaikan yaitu kelompok difabel. Harapannya peserta mendapatkan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan paparan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur setidaknya masyarakat seharusnya memiliki Tas Siaga Bencana sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga yang bisa digunakan untuk bertahan selama 72 jam (3 hari). Isi Tas Siaga Bencana pada umumnya berisi pakaian, alat bantu penerangan, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak P3K, surat-surat penting, peralatan mandi, uang, peluit dan hal-hal pribadi sesuai kondisi individu. Perencanaan individu maupun keluarga terkait bencana ini

sangat penting namun sayangnya kesiapan peserta dari skor 1(tidak memiliki perencanaan) hingga 5 (memiliki perencanaan yang matang) hanya 28,5% yang berada dalam skor 4 dan 5 dan hanya 23,8% peserta dari skor 4 dan 5 (sangat paham) yang paham tentang mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi maupun akses informasi kebencanaan belum maksimal diperoleh kelompok difabel.

a. Kebutuhan Difabel terkait Kebencanaan

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan setidaknya menjadi refleksi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan umum kelompok difabel banyak yang masih belum tersedia secara maksimal pada ruang publik bersama. Dalam situasi bencana dengan resiko rusaknya bangunan dan fasilitas yang sudah ada menjadi tantangan dalam mengakomodasi kelompok difabel saat terdampak bencana.

Dari peserta kegiatan, terdapat tiga jenis disabilitas yakni Disabilitas Netra sebanyak 45%, Disabilitas Fisik (Tuna Daksa) sebanyak 50% dan 5% Disabilitas Mental/Intelektual dapat diketahui kebutuhan yang dibutuhkan terkait kebencanaan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan *word count* atas kata yang sering ditulis oleh peserta terdapat beberapa kata yang sering muncul sebagai fasilitasi peningkatan kapasitas difabel terhadap kebencanaan (lihat gambar 3). Kata-kata tersebut kemudian dikategorisasikan untuk difokuskan menjadi empat hal yang dibutuhkan oleh kelompok difabel untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana yaitu:

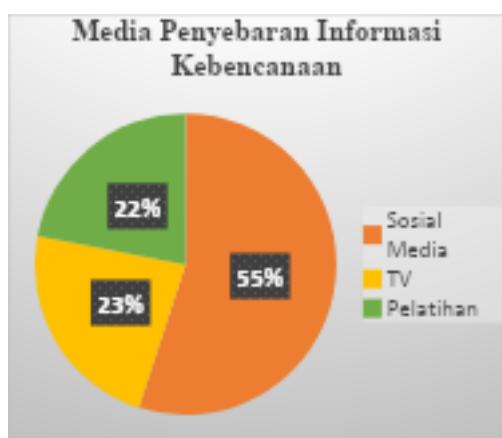
1. Kebutuhan Akses Informasi
2. Kebutuhan Pelatihan dan Simulasi
3. Kebutuhan Bantuan dan Pendampingan
4. Kebutuhan Berjejaring Komunitas



Gambar 3. Harapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kebencanaan oleh Peserta

(Sumber: Analisis dengan *Word Count*, 2024)

Kebutuhan pertama adalah kebutuhan akses pengetahuan dan informasi terkait bencana. Dari sebaran kuesioner terdapat tiga media yang menjadi sumber utama akses informasi dan pengetahuan kebencanaan, yaitu sosial media, televisi dan pelatihan kebencanaan (lihat gambar 4). Dari ketiga media tersebut sosial media menjadi yang paling dominan untuk mengakses informasi. Sosial media bisa menjadi alat untuk menyampaikan informasi yang berfungsi sebagai alat perubahan (Wiguna et al., 2024). Sebanyak 47,6% peserta juga berharap bahwa kemudahan informasi juga bisa banyak diakses sesuai dengan kondisi individu dengan menambahkan informasi menggunakan bahasa isyarat, braille dan papan peringatan dan informasi petunjuk titik kumpul evakuasi.



Gambar 4. Media Penyebaran Informasi Kebencanaan

(Sumber: Hasil Kuesioner Kegiatan, 2024)

Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan pelatihan dan simulasi bencana. Pelatihan ini bisa berupa kegiatan seminar, lokakarya maupun workshop yang memberikan wawasan baru dan kemampuan untuk menjadikan kelompok

difabel mampu membangun kesadaran dan tanggap akan bencana. Melalui kuesioner sebelum kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 57,1 % belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan/workshop kebencanaan sehingga dengan adanya kegiatan ini berdampak positif pada wawasan kebencanaan peserta. Dari sebaran kuesioner setelah kegiatan sebanyak 73,3% peserta merasa sangat puas dengan kegiatan dan 53,3% peserta sangat mudah memahami materi.

Selain kebutuhan terkait pelatihan untuk peningkatan wawasan, kelompok difabel juga perlu mendapatkan pengalaman simulasi untuk praktik mandiri tanggap bencana. Sebanyak 66,6% peserta sepakat ingin mendapatkan pengalaman praktik simulasi penanganan bencana agar bisa memastikan keselamatan diri saat terjadi bencana.

“Semuanya itu harus tanggap bencana supaya pada saatnya mereka mengalami secara langsung itu tidak kaget-kaget *lag*, tidak panik, karena survei membuktikan bahwa bencana apapun bencana itu korbananya banyak karena kepanikan. Jadi, mencegah kepanikan dengan cara memberikan *awareness*, memberikan kesadaran, memberikan keterampilan *life skill* lah, untuk tindakan-tindakan preventifnya harus seperti apa.” (Wawancara. Pinky, 2024)

Kebutuhan ketiga yaitu Bantuan dan Pendampingan. Bantuan di sini tidak hanya kebutuhan pokok seperti pada umumnya, melainkan kebutuhan khusus sesuai kondisi difabel seperti alat bantu pendengaran, alat bantu gerak, alat bantu penglihatan dan lain-lain. 66,7% peserta memiliki kebutuhan khusus saat evakuasi bencana dan 47,6% peserta menyebutkan bahwa belum ada fasilitas atau bantuan khusus saat terjadi bencana. Peran pendamping yang penting bagi difabel. Selama kegiatan berlangsung terlihat bahwa pendamping yang menemani peserta memiliki peran yang sangat signifikan. Pendamping bisa membantu mengarahkan difabel dalam menjalankan aktivitasnya dan menemani ketika kesulitan memahami atau berkomunikasi dengan yang lain. Apabila terjadi bencana kondisi difabel akan lebih membutuhkan

pendampingan. Hasil survei global UNDRR menjelaskan 35% responden dengan keterbatasan fungsi fisik tidak bisa mengevakuasi diri secara mandiri (UNDRR, 2023). Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa masih banyak hal-hal yang belum dipersiapkan secara holistik untuk memenuhi kebutuhan difabel saat terjadi bencana. Kondisi difabel saat terjadi bencana bisa lebih rentan dari masyarakat pada umumnya.

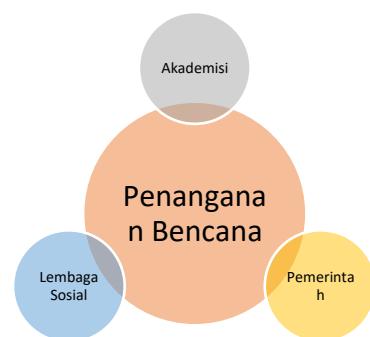
Kebutuhan terakhir, yaitu kebutuhan berjejaring dan berkomunitas. 42,9% peserta belum bergabung pada komunitas difabel yang dapat menjadi media berbagi informasi. Padahal dengan berjejaring dan berkomunikasi penyebaran informasi lebih mudah. Selain itu, pentingnya kesadaran sosial dan responsibilitas penyandang disabilitas dalam menghadapi perubahan sosial termasuk dalam konteks kebencanaan (Albizzia, 2022). Melalui berjejaring dan berkomunitas, anggota kelompok difabel juga bisa sebagai agen untuk saling memberikan wawasan kebencanaan. Kegiatan ini juga bisa menjadi wadah bagi relawan, maupun pihak-pihak terkait untuk saling membangun modal sosial melalui *social bonding*, *social bridging* dan *social linking* (Sakina et al., 2019).

b. Kolaborasi Penanganan Bencana dan Difabel Lintas-Sektor

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak bergerak sendiri dalam melibatkan kelompok difabel untuk terlibat dalam proses membangun masyarakat inklusif. Bekerja sama dengan BK3S Jawa Timur, peningkatan kapasitas kebencanaan ini mengundang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah dan lembaga sosial ini masing-masing membawa peran melibatkan kelompok difabel sebagai upaya membangun masyarakat yang inklusif.

Meninjau kembali tiga fase bencana yakni pra-bencana, tanggap bencana dan pasca-bencana, ketiga sektor ini memiliki kekuatan masing-masing dalam meningkatkan kapasitas

pengetahuan peserta. Fokus dari sektor akademik cenderung mengarah pada persiapan pra-bencana dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan terkadang bantuan sosial bila terjadi bencana baik berupa donasi maupun relawan, lembaga sosial seperti BK3S Jawa Timur banyak berkegiatan pada sektor kesejahteraan sosial dan relawan, sedangkan fokus dari dua instansi pemerintah yakni BPBD dan Dinas Sosial saling berkaitan.



Gambar 5. Kolaborasi Lintas-Sektor Penanganan Bencana

(Sumber: Analisis Peneliti, 2024)

BPBD berfokus pada penanggulangan bencana daerah pada ketiga tahapan bencana tersebut.

”BPBD ini memang mengurus terkait bencana, terkait tahapan bencana mulai dari semua fase-fase dari sebelum bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Semua program BPBD berfokus untuk penanganan bencana.” (Wawancara Ardha, 2024)

Terkait dengan penanganan bencana untuk difabel, BPBD Provinsi Jawa Timur telah memiliki ULD (Unit Layanan Disabilitas) yang melibatkan organisasi disabilitas PERTUNI. Pelayanan penanganan korban bencana penyandang disabilitas juga telah dilakukan di Semarang melalui lima peran yang dijalankan, salah satunya mengenai keterlibatan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tanggap darurat (Dawud, 2024). Komunitas dapat berperan sebagai media penyebaran informasi dalam lingkup kelompok yang sama. Selain menggandeng komunitas, BPBD bekerjasama dengan instansi pemerintah

lainnya seperti BMKG yang menyuarakan skema peringatan diri secara resmi bencana yang sedang terjadi. BPBD menjelaskan bahwa dalam situasi terdampak bencana harus memperhatikan kebutuhan dasar yakni MOKA (Makanan, Obat, Komunikasi, dan Air) hingga setelah bencana berakhir BPBD masih menangani dukungan psikososial kepada korban terdampak.

Peran Dinas Sosial terkait dengan penanganan bencana fokus pada penanganan bencana.

“Penanganan bencana ini terdiri dari penanganan bencana alam, penanganan bencana sosial, dan penanganan kelompok rentan dan LBP.” (Wawancara. Hanif, 2024)

Fokus Dinas Sosial adalah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban-korban atau penyintas bencana. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas membentuk bidang-bidang pencegahan dan penanganan bencana, seperti Kampung Siaga Bencana, Tagana (Relawan) dan Lumbung Sosial. Tagana sebagai salah satu program yang digagas oleh Kementerian Sosial merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat umum untuk bisa terlibat dalam penanggulangan bencana.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan Tagana adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2012). Tagana bisa menjadi wadah untuk membantu penanganan bencana yang bersumber dari relawan sosial namun relawan sosial ini harus dibekali pengetahuan tentang kebencanaan. Pembekalan pengetahuan ini bisa berupa sosialisasi maupun penyuluhan yang terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketanggapan relawan terkait kebencanaan (Mahsyar et al., 2024). Hal ini juga terbukti dari kegiatan pengabdian masyarakat ini peserta mendapatkan wawasan kebencanaan dari kegiatan ini dan peserta

merasa siap (46,7%) dan sangat siap (26,7%) dalam tanggap bencana.

Relawan sosial bisa menjadi modal penguatan sosial dalam masyarakat. Nilai inilah yang menjadi sorotan oleh BK3S Jawa Timur dalam penyampaian materinya. Terdapat tiga hal yang penting diperhatikan dalam menguatkan masyarakat yaitu kesadaran atas jiwa sosial, membangun relasi sosial dan kepercayaan antar masyarakat. Membangun kesadaran jiwa sosial ini harus ditransformasikan dan dikerjakan bersama-sama agar dapat memperpanjang peluang akses layanan masyarakat terhadap sesama terutama kelompok yang rentan seperti difabel yang selama ini masih banyak yang terabaikan. Peran lembaga kesejahteraan sosial seperti BK3S ini adalah turut menyalurkan kegiatan sosial agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

“Melatih kepekaan sosial, ya itu ga bisa pake teori harus praktek, harus turun sendiri. Ya mereka buktinya ya nggak kapok itu malah ikut terus ikut terus berarti itu memang sudah sadar, memang sudah tertarik, energinya disalurkan kesana. Kami mencoba memberi ruang, kesempatan bagi siapa saja yang ingin beraktivitas sosial karena yang membutuhkan bantuan sosial ini banyak banget.” (Wawancara. Pinky, 2024)

Dari keempat instansi tersebut, mulai dari Departemen Antropologi, BK3S Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan BPBD Provinsi Jawa Timur bersama-sama berupaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dengan menggandeng komunitas difabel sebagai masyarakat yang aktif dan bisa berdaya untuk turut berpartisipasi (lihat gambar 6). Tentunya masih ada tantangan dan persoalan yang belum terjangkau dalam mewujudkan keterlibatan difabel secara menyeluruhan.



Gambar 6. Mengupayakan Inklusif dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

(Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024)

Untuk mengupayakan kegiatan yang melibatkan aspek-aspek SDGs adalah hal yang perlu menjadi tanggung jawab bersama. Terutama terkait dengan konteks penanggulangan bencana yang terdiri dari banyak fase yang realitanya sangat kompleks. Tantangan melibatkan difabel dalam kebencanaan tidak hanya berasal dari eksternal seperti fasilitasi dan akses layanan kebencanaan yang belum bisa memenuhi kebutuhan difabel secara maksimal, maupun internal dari masing-masing individu dengan kemelekatan stigma negatif selama ini, tetapi juga secara sistem keseluruhan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami dan menguasai kemampuan evakuasi bencana, maksimalnya integrasi antar tingkatan pemerintahan terkait prioritas dalam kebencanaan non-ekonomi, dan keterlibatan relawan yang terbatas adalah beberapa tantangan yang bisa dikaji lebih lanjut terkait isu-isu tanggap bencana. Kemitraan multi-stakeholder dapat dikelompokkan menjadi masalah sistemik yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian SDGs seperti koherensi kebijakan dan kelembagaan, serta data, pemantauan dan akuntabilitas (Stott & Murphy, 2020). Namun setidaknya, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi salah satu upaya yang melibatkan dari berbagai instansi lintas sektor dan beragam kelompok difabel sehingga prinsip SDGs *Leave No One Behind* bisa terwujud.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki acuan untuk menjalankan prinsip-prinsip SDGs sebagai upaya membangun masyarakat yang inklusif. Aspek SDGs yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah *Partnerships for The Goals* dan *Reduced Inequalities*. Terdapat dua poin dalam aspek *Partnerships for The Goals* yang menjadi tujuan kegiatan ini yaitu Kemitraan Lintas Pemangku Kepentingan dan Pengembangan Kapasitas dan satu poin dalam aspek *Reduced Inequalities* yaitu Disabilitas. Sehingga sasaran kegiatan ini adalah kelompok difabel di Surabaya yang berasal dari beragam komunitas untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kegiatan ini melibatkan banyak instansi, tidak hanya dari sektor pendidikan saja, melainkan juga dari pemerintahan dan lembaga kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan ini dapat diketahui bahwa kelompok difabel masih belum memperoleh wawasan dan kemampuan tentang kebencanaan secara merata. Terdapat empat kebutuhan kelompok difabel untuk mendukung pengetahuan dan wawasan mereka dalam hal kebencanaan yaitu akses informasi, pelatihan dan simulasi, bantuan dan pendampingan serta berjejaring dalam komunitas. Dengan adanya kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, praktik simulasi kebencanaan dapat membawa dampak positif, tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga bisa menggali kebutuhan yang diperlukan oleh difabel, membangun relasi antar komunitas dan melibatkan difabel dengan peluang berpartisipasi dalam program-program yang ada dari pemerintah. Tentunya dalam proses pembangunan masyarakat inklusif yang tanggap bencana diperlukan koordinasi dan kerja yang terintegrasi tiap sektor, tidak hanya pemerintah dan masyarakat tetapi juga industri dan media yang ramah dan peduli difabel sehingga upaya pembangunan inklusif dapat terlaksana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga melalui skema Mandatori Fakultas Tahun 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. W., Shalih, O., Shabrina, F. Z., Rizqi, A., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Alfian, A., Syauqi, Septian, R. T., Widiastomo, Y., Bagaskoro, Y., Dewi, A. N., Rahmawati, I., Seniarwan, Suryaningrum, H. A., Purnamaswi, D. I., & Puspasari, T. J. (2023). IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). In *Badan Nasional Penanggulangan Bencana* (Vol. 01).
- Albizzia, O. (2022). Pemberdayaan Difabel Siaga Bencana (Difagana) dalam Sistem Manajemen Bencana Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(1), 41–58. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i1.41-58>
- Aziz, M. H. (2024). Komunikasi Bencana Berbasis Digital. *Communicator Sphere*, 4(1), 57–73. <https://doi.org/10.55397/cps.v4i1.111>
- Bickenbach, J., Degener, T., Melvin, J., Quinn, G., Posarac, A., Schulze, M., Shakespeare, T., & Watson, N. (2011). Chapter 1: Understanding disability. In *WHO. World report on disability*. Malta: WHO. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Chapter+1+Understanding+disability#4>
- Dawud, M. (2024). Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi penyandang disabilitas. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.385>
- Kelman, I., & Stough, L. M. (2015). (Dis)ability and (Dis)aster. In I. Kelman & L. M. Stough (Eds.), *Disability and disaster : explorations and exchanges* (1st ed., pp. 3–14). PALGRAVE MACMILLAN.
- Lasaiba,A. M. (2023). Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Longsor. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 634-649.
- Lutfiyya, Z. M., & Bartlett, N. A. (2020). Inclusive Societies. *Oxford Research Encyclopedia of Education*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1022>
- Mahsyar, A., Jusman, Afdal, A. A. M., & Mahka, M. F. R. (2024). Sosialisasi Kebijakan Kebencanaan Bagi Relawan TAGANA di Kabupaten Gowa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 204. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.50458>
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Tagana. In *Menteri Sosial Republik Indonesia*.
- Modim, M. R. M., Pattipailohy, M. G. A., Teresa, S. R., Pratama, Y. R., Anjele, & Marhaeni, N. H. (2023). Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana Gempa di Komunitas Difabel Difasari Sedayu Bantul Yogyakarta. *Room of Civil Society Development*, 2(1), 57–65. <https://doi.org/10.59110/rcsd.v2i1.171>
- Mutasim. (2016). Stigma Sosial terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat. *Sociologique, Jurnal SI Sosiologi*, 4(1), 1–17. <http://jurmafis.untan.ac.id>
- Panda, S., & Kaur, N. (2023). Leaving No One Behind: Achieving the Sustainable Development Goals through Accessibility for People with Disabilities. *International Journal of Educational Communications and Technology*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10050814>
- Pramono, B., & Febriyantoko, D. (2020). Pelatihan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana untuk Anak Penyandang Disabilitas MTs LB/A Yaketunis Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Seni*, 1(1), 11-22.
- Purba, I. P., Tauran, T., Widianti, A., & Lianna, I. (2023). Fulfillment employment rights for individuals with disabilities in

- Surabaya. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 280-291.
- Purnomo, M., Wibowo, S., Ashadi, K., & Fithroni, H. (2021, December). Strategy for empowering the city of Surabaya as a disability-friendly and elderly friendly city. In International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021) (pp. 658-662). Atlantis Press.
- PuSGeN, Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017, P.L.P.d. Permukiman, Editor. 2017. p. 400.
- Sakina, W. A., Setyowati, Y., & Albizzia, O. (2019). Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) Dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta. *The 6th Annual Scientific Meeting On Disaster Research*, 1–15.
- Sari, D. P., Priratmaningtyas, I. W. ., Sari, K., Afifah, I. N. ., Halisa, H., & Astuti, T. (2020). Pekan Siaga Bencana Pada ABK Di SLB Manunggal Slawi . Efektor, 7(2), 164–170.
<https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15042>
- Setijaneringrum, E., Kassim, A., Soegiono, A. N., & Ariawantara, P. A. F. (2024). Beyond tokenism, toward resilience: furthering a paradigmatic shift from intersecting narratives of disaster and disability realities in East Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2319376.
- Sianturi, R. S., Pamungkas, A., Elisiyah, I., Ferrajuanie, A., Putri, R. I., & Yusuf, M. (2020, August). Investigating the response of students with disabilities to earthquakes: Preliminary results. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 562, No. 1, p. 012010). IOP Publishing.
- Siyaranamual, M. (2018). *Analisa Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Tantangan dan Hambatan*.
- Stott, L., & Murphy, D. F. (2020). An inclusive approach to partnerships for the SDGs: Using a relationship lens to explore the potential for transformational collaboration. *Sustainability (Switzerland)*, 12(19).
<https://doi.org/10.3390/SU12197905>
- Tikasari, W. Y., & Agustin, N. N. (2019). Collaborative Governance in Administering Health for People With Disabilities (Case Study in Surabaya City). Available at SSRN 3497278.
- UNDRR. (2023). 2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters. In *2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters*.
<https://doi.org/10.18356/9789213585795>
- Wicaksono, D., Suryandari, N., & Camelia, A. (2021). Stereotip Tentang Difabel : Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 33–43.
- Wiguna, I. P., Zen, A. P., & Rachmawanti, R. (2024). Pembuatan Film Dokumenter Sebagai Media Sosialisasi Aktivitas Yayasan Pusat Informasi Dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Dan Anak Dengan Down Syndrome Jawa Barat. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 104.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.52186>